

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG JASA, BELANJA
MODAL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB) DI WILAYAH SUMATERA**

(Skripsi)

Oleh

NADIYA HASNA ADYANKA

NPM 2051021006



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG JASA, BELANJA MODAL, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI WILAYAH SUMATERA

Oleh

NADIYA HASNA ADYANKA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan jumlah penduduk terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Wilayah Sumatera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan menggunakan aplikasi E-views 10. Hasil analisis regresi pada penelitian ini menggunakan model terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Wilayah Sumatera.

Kata Kunci: Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, PDRB

ABSTRACT
**THE INFLUENCE OF EMPLOYEE EXPENDITURE, GOODS AND SERVICES
EXPENDITURE, CAPITAL EXPENDITURE AND POPULATION ON GROSS
REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GRDP) IN SUMATRA**

By

NADIYA HASNA ADYANKA

This research aims to determine the influence of employee expenditure, goods and services expenditure, capital expenditure and population on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Sumatra. The research uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Ministry of Finance. The analytical tool used is panel data multiple regression analysis, utilizing the E-Views 10 application. The results of the regression analysis in this study, using the selected model which is the Random Effect Model (REM), show that the independent variables, namely employee expenditure and goods services expenditure, have a positive and significant effect on GRDP. Meanwhile, capital expenditure and population has a positive but not significant effect on GRDP in Sumatra.

Keywords: *Employee Expenditure, Goods and Expenditure, Capital Expenditure, Population, GRDP.*

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG JASA, BELANJA
MODAL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB) DI WILAYAH SUMATERA**

Oleh

NADIYA HASNA ADYANKA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang
Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk
terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) PDRB di Wilayah Sumatera**

Nama Mahasiswa : **Nadiya Hasna Adyanka**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2051021006**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Arivina Ratih Y.T.
Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.
NIP 19800705 200604 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

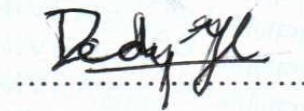
Ketua : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.



Penguji I : Moneyzar Usman, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Oktober 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadiya Hasna Adyanka

NPM : 2051021006

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Sumatera” merupakan hasil karya saya sendiri, telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



Nadiya Hasna Adyanka

RIWAYAT HIDUP



Nadiya Hasna Adyanka lahir pada tanggal 31 Oktober 2002 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Djoko Sugianto dan Kartika Ningsih.

Penulis memulai pendidikannya di TK Kartika-II yang berada di Kota Bandar Lampung, yang diselsaikan pada tahun 2008.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 1 Langkapura dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Ar- Raihan Kota Bandar Lampung tamat pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA YP UNILA dan tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis melanjutkan studi di Universitas Lampung yang diterima melalui jalur Mandiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Suka Negara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 6)

“ Meminta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al -Baqarah :153)

“Believe in yourself, your tiredness, your patience, your pain, will be replaced by happiness”

(Nadiya Hasna Adyanka)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, cinta, dan
S kasih sayang-Nya yang melimpah, shalawat serta salam selalu kupanjatkan
kepada Nabi Muhammad S.A.W.*

*Dengan Kerendahan hati, bersama keridhaan-Mu ya Allah,
kupersembahkan karya tulis ini kepada :*

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Djoko Sugianto

Kartika Ningsih

*Terimakasih atas segala doa dan nasihat yang selalu diberikan pada setiap
langkahku. Terimakasih atas segala dukungan baik moral dan materi yang selalu
kalian berikan.*

Serta

Almamater Tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

Semoga karya kecil ini bermanfaat

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Sumatera** ” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan, motivasi, saran dan nasihat sehingga skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik.
3. Ibu Zulfa Amalia, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan

motivasi, dukungan, semangat serta ilmu dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, motivasi, saran serta nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., Msi. selaku Dosen Pembahas pada seminar proposal yang telah memberikan masukan, motivasi, saran serta nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas pada seminar proposal yang telah memberikan masukan, motivasi, saran serta nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Prayudha Ananta., S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, motivasi, saran serta nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam masa perkuliahan.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Djoko Sugianto dan Kartika Ningsih yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat dan dukungan secara moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih atas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus dan sepuh hati.
12. Kakakku, Nadira Hisya Adyanka, terima kasih telah memberikan doa, nasihat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar dari pihak kedua orang tuaku, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penyelesaian skripsi ini dapat menjadi kebanggaan untuk kalian semua.
14. *Publik Genk*, Aqila Diva Fajrina, Ulfa Sekar Dini, Laura Dwipa Saskia, Rezi Puspita Chaniago dan Ias Dinar Realyta yang telah mewarnai masa

perkuliahan penulis. Terima Kasih atas canda tawa, dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini.

15. Sahabat terbaikku, Manda, Claudia, Reka, Soraya, Enjel, Muhyi, Ika dan Putri, terima kasih telah hadir dalam hidup Penulis serta senantiasa mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat, dukungan, motivasi dan memberikan keceriaan selama ini.
16. *Perencanaan Genk*, Adisa, Fira, Silva, Lili, dan Deswira, terima kasih atas canda tawa, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini.
17. Teman-teman KKN, Mustika, April, Chintia, Rika, Rahmat dan Dimas, terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama 40 hari di Desa Suka Negara.
18. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2020, terima kasih telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam masa perkuliahan ini, dan berbagai pihak lainnya yang ikut serta membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
19. Diri saya sendiri, terima kasih telah mampu bertahan sampai sejauh ini dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian	12
4. Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Pustaka	14
2.1.1 Fungsi dan peran pemerintah	14
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.5 Belanja Pegawai	20
2.1.6 Belanja Barang Jasa	21
2.1.7 Belanja Modal	22
2.1.8 Jumlah Penduduk	24
2.2 Pengaruh Antar Variabel	26
2.3 Tinjauan Empiris	28
2.4 Kerangka Pemikiran	30
2.5 Hipotesis Penelitian	31
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	32
3.2 Jenis dan Sumber Data	32

3.3	Definisi Operasional Variabel	33
3.4	Teknis Analisis Data	34
3.5	Prosedur Analisis Data	34
3.5.1	Metode Regresi Data Panel	35
3.5.2	Uji Spesifikasi Model	35
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	36
3.5.4	Pengujian Hipotesis	37
3.5.5	Koefisien Determinasi	38
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	40
4.2	Uji Kesesuaian Model	40
4.3.	Estimasi Pemilihan Lag.....	42
4.4.	Uji Spesifikasi Model.....	43
4.3.2	Hasil Estimasi Regresi Data Panel	45
4.5	Uji Asumsi Klasik	45
4.5.1	Uji Normalitas	46
4.5.2	Uji Heteroskedastisitas	47
4.5.3	Uji Multikolinearitas.....	47
4.6	Uji Hipotesis.....	48
4.6.1	Uji T.....	48
4.6.2	Uji F.....	49
4.7	Koefisien Determinasi (R^2).....	50
4.8	Nilai <i>Individual Effect</i>	50
4.9	Pembahasan Hasil Penelitian	53
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	v
	LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Deskripsi Data	32
Tabel 4.1 Hasil Uji statistik deskriptif.....	41
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Lag</i>	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier	44
Tabel 4.6 Hasil regresi <i>Random Effect Model</i>	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.10 Hasil Uji T Statistik	48
Tabel 4.11 Hasil Uji F Statistik	49
Tabel 4.12 Hasil <i>Individual Effect</i>	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018-2002.....	2
1.2 Belanja Pegawai Wilayah Sumatera Tahun 2018-2022.....	5
1.3 Belanja Barang Jasa Wilayah Sumatera 2018-2022.....	6
1.4 Belanja Modal Pulau Wilayah Tahun 2018-2022	8
1.5 Jumlah Penduduk Wilayah Sumatera Tahun 2018-2022	9
4.1 Hasil Uji Normalitas.....	46

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

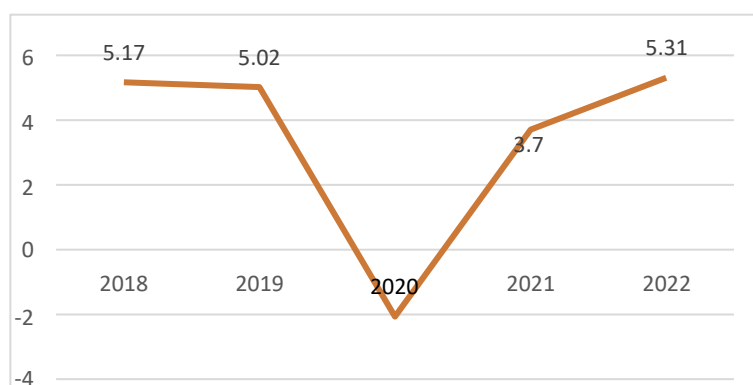
Indonesia sebagai negara berkembang sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui menerapkan strategi pembangunan jangka pendek juga panjang pada tiap daerah. Pemerintah memiliki peran aktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang terlihat dalam anggaran APBN dan APBD. Dengan adanya kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan pada satu wilayah menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menampilkan barang-jasa diproduksi oleh suatu wilayah (Liow *et al*, 2022).

Pertumbuhan ekonomi adalah penanda kemajuan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi satu wilayah akan menunjukkan peningkatan perekonomiannya. Inisiatif peningkatan produktivitas adalah bagian dari proses pembangunan ekonomi, yang berupaya untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial saat ini (Yuliawan & Wanniatie, 2021). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu pengukuran kuantitatif dalam menilai pembangunan suatu wilayah.

Tiap daerah, karakteristiknya beragam dalam kegiatan ekonomi. Perekonomian menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang meningkatkan pendapatan daerah dari waktu ke waktu. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan aliran kompensasi atas input yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai pemilik

komponen produksi, masyarakat dapat mengantisipasi peningkatan pendapatannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Husin, 2022).

Proses pertumbuhan ekonomi di sejumlah pulau di Indonesia aktif melaksanakan pembangunan secara bertahap dan terstruktur, begitupun dengan wilayah Sumatera yang sudah melakukan pembangunan di berbagai sektor dengan harapan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat sertamewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian daerah masih menjadi kunci keberhasilan setiap negara dan setiap bagian negara untuk terus memutar roda perekonomian (Ratih & Gurnita, 2022). Pulau Sumatera merupakan pulau dengan pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Selama ini, aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga menimbulkan kesenjangan antara wilayah Jawa dan di luar Jawa.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, diolah

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2018-2022

Gambar 1.1 mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami dinamika yang relatif stabil. Pada 2018, pertumbuhannya bernilai 5.17% didukung peningkatan konsumsi domestik yang kuat dan investasi membaik. Namun pada 2020, pertumbuhannya turun sangat tajam dikarenakan adanya Covid-19. Dengan rendahnya perekonomian pada tahun 2020, beberapa faktor yang menjadi penyebab seperti halnya pendapatan dari produk barangjasa yang dihasilkan setiap wilayah dapat mempengaruhi perbedaan perekonomian.

Indikator utama dalam tolak ukur pertumbuhan ekonominya suatu wilayah yakni Produk Domestik Bruto (PDRB). Pembangunan suatu daerah saat ini sering kali diukur melalui indikator- indikator perekonomian yang dapat menunjukkan peningkatan serta penurunan perekonomian. Perhitungan PDRB merupakan hal penting dalam ekonomi daerah untuk mengukur kegiatan ekonomi yang sedang terjadi (Deswanto *et al*, 2017).

Badan Pusat Statistik (2022) menyatakan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terbilang kondusif dikarenakan adanya peningkatan kegiatan masyarakat setelah pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera secara kumulatif berada pada posisi terakhir jika dibandingkan dengan Pulau lainnya. Pulau Maluku dan Papua merupakan yang paling tinggi pertumbuhannya 8,65 % dilanjutkan Sulawesi sebesar 7,05%, Jawa 5,31%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 5,08% dan Sumatera sebesar 4,69%. Berikut data PDRB di wilayah Sumatera tahun 2018-2022 menurut provinsi :

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Sumatera tahun 2018-2022 (Miliar)

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	126.824	132.070	131.581	135.258	140.948
2	Sumatera Utara	512.763	539.514	533.746	547.652	572.652
3	Sumatera Barat	163.996	172.206	169.427	175.000	182.629
4	Riau	482.065	495.607	489.996	506.472	529.533
5	Jambi	142.902	129.111	148.354	153.851	161.730
6	Sumatera Selatan	298.484	315.465	315.129	326.405	343.460
7	Bengkulu	44.164	46.345	46.338	47.835	49.916
8	Lampung	232.166	244.378	240.320	246.966	257.534
9	Kep. Bangka Belitung	52.208	53.941	52.705	55.369	57.803
10	Kep. Riau	173.498	181.877	174.656	180.952	190.163

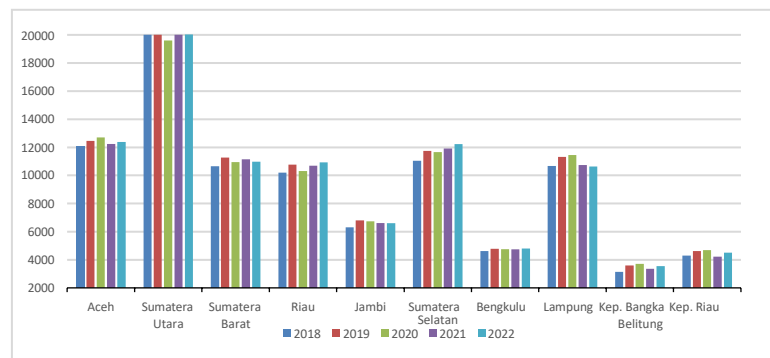
Tabel 1.1 memperlihatkan PDRB Wilayah Sumatera sangat berfluktuasi dengan angka yang selalu mengalami peningkatan pada tahun 2018-2022. Sumatera Utara merupakan provinsi di pulau Sumatera dengan PDRB tertinggi dengan rata-rata nilai sebesar 541.24 milyar, kemudian diikuti provinsi Riau dengan rata-rata 500.73 milyar. Sedangkan provinsi Bengkulu berada pada nilai PDRB terendah dengan rata-rata nilai 46.92 milyar. Pencapaian PDRB pada setiap provinsi mempunyai nilai yang beragam. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi regional, variasi sumber daya alam antar wilayah dan variasi keadaan fisik.

Peningkatan dan penurunan PDRB yang signifikan mencerminkan perekonomian yang tumbuh dan menunjukkan kapabilitas suatu daerah guna memenejemen SDA-nya akan memengaruhi PDRB, dimana bergantung pada peluang SDA-nya juga faktor produksinya daerah itu (Alvaro, 2022). Tujuan PDRB adalah untuk menghitung pertumbuhan PDRB secara *real time* dengan menggunakan harga konstan dari periode ke periode berikutnya atau tidak dipengaruhi oleh faktor harga (Tanjungpura, 2022).

Sistem pengalokasian belanja daerah yang belum merata dan tepat sasaran bisa menjadi faktor rendahnya PDRB di suatu daerah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Belanja daerah ialah pengeluaran pemerintah daerah (Pemda) melalui APBD yang mencakup belanja dan pembiayaan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan kewajiban desentralisasi (Pangestu, 2018). Pengeluaran pemerintah dapat meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik pemerintah perlu mengalokasikan pengeluaran melalui belanja yang efisien.

Belanja pemerintah berusaha untuk meningkatkan perekonomian yang mencakup realisasi dari belanja langsung maupun tak langsung. Belanja pegawai ialah komponen belanja tak langsung, dimana itu merupakan pengeluaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk membayar gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya (Treza Trampubolon & Ariadi, 2023). Belanja pegawai ialah bagian besar dari pengeluaran pemda. Belanja pegawai berdampak langsung pada PDRB dan

produksi ekonomi daerah, yaitu pada pendapatan yang diterima oleh pegawai digunakan untuk konsumsi barang jasa (Rahmawati, 2022). Dengan demikian, pengalokasian pengeluaran pemerintah yang efisien maka akan membantu dalam peningkatan konsumsi di masyarakat.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Gambar 1.2 Belanja Pegawai Pulau Sumatera tahun 2018-2022.

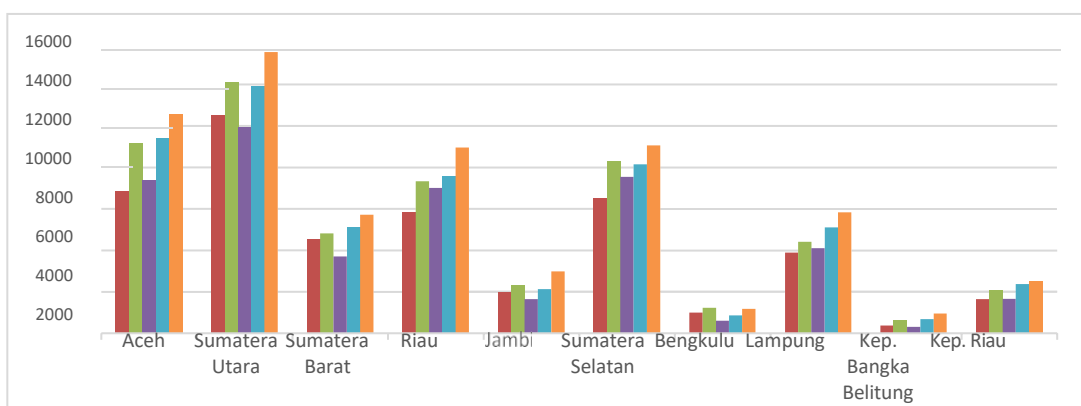
Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan belanja pegawai sangat bervariasi di setiap tahun jika melihat pada skala provinsi terlihat wilayah dengan rata-rata belanja pegawai paling tinggi berada pada Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 20084.66 milyar sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai belanja pegawai terendah dengan rata-rata nilai sebesar 3649.12 milyar. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pengalokasian anggaran belanja pegawai untuk pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang baik.

Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi pada pengeluaran pemerintah sangat berperan. Dengan demikian, pengelolaan konsumsi pemerintah perlu dilakukan secara efisien sesuai pada indikator yang ingin dicapai. Salah satu konsumsi pemerintah didominasi oleh belanja pegawai. Pemerintah akan memberikan imbalan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas kinerjanya melalui gaji dan pendapatan lainnya.

Salah satu elemen yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi yakni penghasilan masyarakat. Penghasilan masyarakat yang tinggi akan memberikan peluang untuk pembayaran pajak. Penerimaan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan dan program lain yang mendukung pembangunan ekonomi (Erdkhadifa, 2022).

Penghasilan individu yang meningkat akan menciptakan perekonomian yang meningkat, hal ini dapat ditunjukkan dengan daya belinya masyarakat meningkat sehingga menciptakan permintaan barang jasa (Dein & Misra, 2023). Dalam keadaan ini, suatu perusahaan akan meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pengeluaran pemda diukur berdasarkan total belanja langsung dalam APBD. APBD adalah modal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu komponen dalam APBD adalah Belanja barang jasa lalu belanja modal termasuk pada belanja langsung. Belanja barang-jasa digunakan pemerintah guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi permintaan belanja barang jasa suatu daerah, maka akan besar pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi (Hutahaean, 2019).



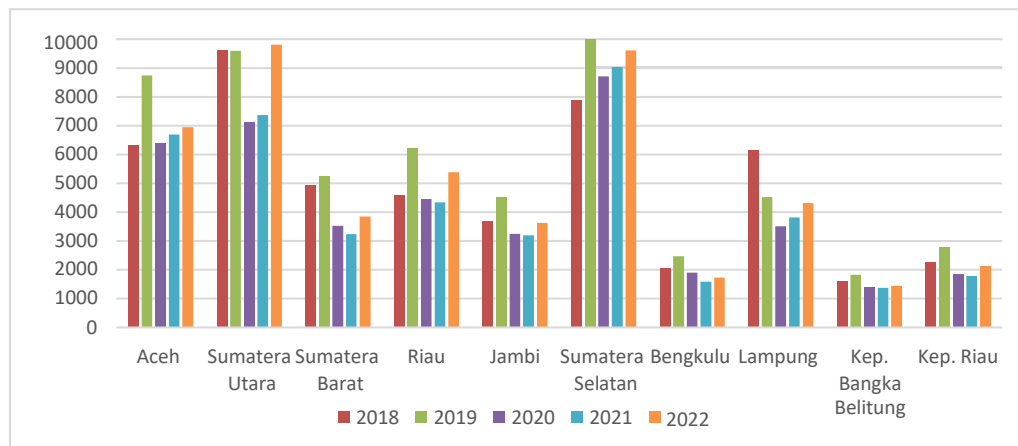
Sumber : DJPK, 2024

Gambar 1.3 Belanja Barang dan Jasa Pulau Sumatera tahun 2018-2022.

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan belanja barang dan jasa sangat berfluktuatif di setiap tahun dikarenakan naik-turunnya di tiap tahunnya. Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang mempunyai nilai barang dan jasa tertinggi dengan rata-rata nilai sebesar 13600.46 milyar. Sedangkan belanja barang jasa terendah berada di Kep. Bangka Belitung dimana reratanya sebesar 2586.15 milyar. Belanja barang jasa mengacu pada pengeluaran pemerintah guna membeli barang atau membayar jasa yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Pemerintah Kep. Bangka Belitung berupaya pengalokasian belanja barang dan jasa dapat terus meningkat. Tantangan dalam belanja barang jasa akan semakin kompleks, dalam memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efisien agar membangun perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung yang berkualitas.

Pemerintah provinsi di wilayah Sumatera berusaha meningkatkan sarana dan prasarana publik seperti membangun sekolah, jalan dan layanan kesehatan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna mendukung perekonomian. Namun, beberapa pemerintah daerah menghadapi masalah terkait dengan alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran ialah alokasi dana penggunaannya pada tiap kegiatan. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengemukakan pemerintah daerah harus menyesuaikan pendapatan dari belanjadaerah untuk belanja produktif secara adil supaya dapat dirasakan semua masyarakat dan tidak ada diskriminasi.

Pembangunan suatu daerah akan berhasil jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai sasaran. Pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat memerlukan pendanaan besar yang perlu didukung dengan peningkatan fiskal daerah. Peningkatan belanja untuk aset tetap seperti infrastruktur penting meningkatkan produktivitas ekonomi (Taher & Tuasela, 2019). Demikian, belanja modal sering kali dipandang sebagai faktor penting dalam membangun infrastruktur dan aset tetap lainnya dalam manfaat jangka panjang.



Sumber : DJPK, 2024

Gambar 1.4 Belanja Modal Pulau Sumatera tahun 2018-2022

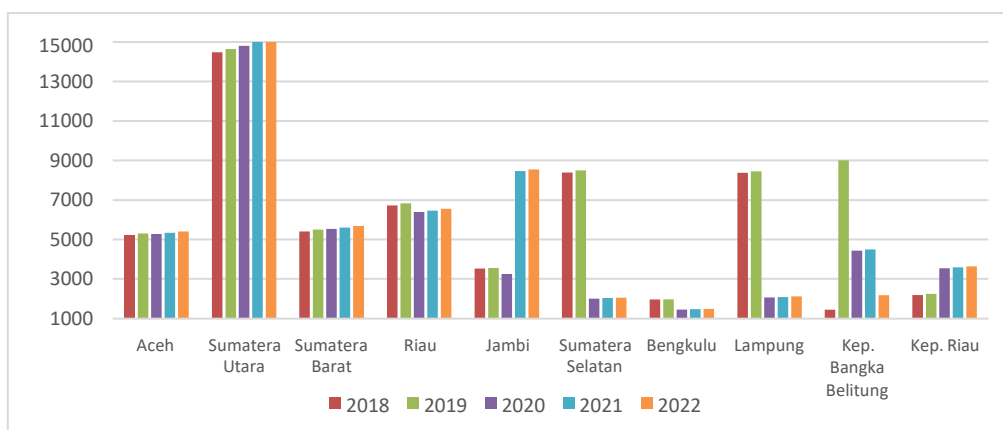
Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan belanja modal sangat berfluktuatif di tiap tahun dikarenakan naik-turunnya di setiap tahunnya. Sumatera Selatan ialah nilai modal tertinggi dengan rata-rata sebesar 9116.81 milyar dan belanja modal terendah berada di Kep. Bangka Belitung di mana nilai rata-rata sebesar 1520.61 milyar. Pemerintah sangat bergantung pada APBN dan APBD guna meningkatkan pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No. 2 Tahun 2015 mengenai RPJMN 2015-2019 mengemukakan pengalokasian minimal belanja modal sebesar 30% dari total belanja daerahnya.

Meskipun pengalokasian belanja modal Kep. Bangka Belitung masih terendah diantara provinsi lainnya tetapi pemerintah Bangka Belitung terus mengupayakan agar anggaran belanja modal dapat dialokasikan secara tepat sasaran. Belanja modal ialah jenis pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam membangun infrastruktur sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja modalnya pemerintah melibatkan penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Penduduk mendapatkan penghasilan bisa menggunakan pendapatannya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekonomi (Gosal *et al*, 2022).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan setiap tahun menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menandakan penurunan kesejahteraan ekonomi. Menurut teori Keynes, pemerintah berperan aktif dalam ekonomi di suatu negara untuk mengoptimalkan proses pembangunan ekonomi.

Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah bisa berdampak ke pertumbuhan ekonominya di wilayah itu. Guna mencapai kesuksesannya pembangunan daerah harus terdapat upaya peningkatan PDRB. Jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan dan memperluas pasar sehingga akan mendorong aktivitas ekonomi suatu wilayah. Selain itu, jumlah penduduk dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Pertambahan populasi dan pengetahuan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa (Desmawan *et al*, 2022).

Jumlah penduduk di wilayah Sumatera cukup besar setelah Pulau Jawa. Sekitar 30% total penduduk Indonesia tinggal di Sumatera. Menurut data dari BPS, tahun 2018 sampai tahun 2022 jumlah penduduk di wilayah sumatera mengalami fluktuasi, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,1% hingga 1,27%. Peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahunnya mencerminkan migrasi dan pertumbuhan alami di wilayah tersebut.



Sumber : BPS, 2024

Gambar 1.5 Jumlah Penduduk wilayah Sumatera tahun 2018-2022

Tabel 1.4 memperlihatkan hasil jumlah penduduk Sumatera 2018-2022 mengalami peningkatan dan penurunan, namun di berbagai wilayah mengalami peningkatan jumlah penduduk. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduknya paling tinggi tahun 2022 nilainya sebesar 15386.6 jiwa, sementara Kep.Bangka Belitung ialah yang jumlah penduduknya terendah pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 1432.1 jiwa. Meskipun di berbagai wilayah mengalami penurunan yang disebabkan faktor lain diantaranya pada pandemi Covid akibat meningkatnya angka kematian. Penurunan jumlah penduduk akibat pandemi ini menjadi perhatian serius dikarenakan berdampak bagi pembangunan dan masyarakat (Ayu, 2022).

Daerah yang luas memerlukan lebih banyak pelayanan untuk masyarakat dibandingkan dengan daerah yang lebih kecil. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan pengelolaan sumber daya, serta menciptakan usaha baru yang diharapkan dapat mengembangkan aktivitas usaha di suatu wilayah (Syahrudi & Amalia, 2024).

Menurut UU No. 9 Tahun 2015 Otonomi daerah ialah hak-wewenang juga kewajiban daerah otonom dalam mengelola masalah daerahnya sendiri demi kepentingan masyarakat daerah tersebut dalam sistem NKRI. Sebagai pelaksana otonomi daerah pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan lokal daripada pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang efisien serta meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan tercapai jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat memerlukan dana besar yang harus didukung dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan publik dibutuhkan guna meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengadaan barang publik dan konsumsi (Ardianto & Usman, 2022). Hal ini akan berdampak positif pada belanja modal, indikator ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bisa memberi pengaruhnya ke pengangguran, kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan belanja (Pangestu, 2018).

Pada penelitian Ayu Mustina, (2020) yang menghasilkan bahwa belanja pegawai lalu belanja barang jasa menunjukkan hasil positif-signifikan, sementara belanja modal berpengaruh negatif-signifikan pengaruhnya pada PDRB Sumatera Selatan. Belanja daerah digunakan untuk menambah sarana-prasarana guna menstimulus produktivitas masyarakat serta wirausaha daerah tersebut. Selain itu, belanja pemerintah juga dialokasikan untuk layanan pendidikan dan kesehatan dimana ialah kebutuhan dasar. Pengalokasian belanja untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum akan meningkatkan kualitas, produktivitas daerah, pendapatannya masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan Pusporini, (2020) dalam penelitian pengaruh pendapatan dan belanjadaeah terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan temuan riset belanja modal berpengaruh positif-taksignifikan pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Artinya, belanja daerah belum seutuhnya mencapai pembangunan yang dikerjakan pemerintah. Serta penelitian Dewi, (2024) dengan hasil penelitian jumlah penduduk tidakberpengaruh signifikan ke pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Sesuai penjabaran, peneliti ingin mengetahui pengaruh dari variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap PDRB di sejumlah provinsi Pulau Sumatera. Dengan demikian, penelitian terkait hal ini lebih lanjut harus dianalisis “ Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap PDRB.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam riset ini yakni:

1. Bagaimanakah pengaruhnya Belanja Pegawai pada PRDB di wilayah sumatera 2018-2022?
2. Bagaimanakah pengaruhnya Belanja Barang Jasa pada PDRB di wilayah sumatera 2018-2022?
3. Bagaimanakah pengaruhnya Belanja modal pada PDRB di wilayah sumatera 2018-2022?
4. Bagaimanakah pengaruhnya Jumlah penduduk pada PDRB di wilayah sumatera 2018-2022?
5. Bagaimanakah pengaruhnya Belanja Pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan jumlah penduduk secara bersama-sama pada PDRB di wilayah sumatera 2018-2022?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan riset ini yakni :

1. Guna mengetahui apakah belanja pegawai berpengaruh pada PDRB di wilayah sumatera 2018-2022.
2. Guna mengetahui apakah belanja barang jasa berpengaruh pada PDRB di wilayah sumatera 2018-2022.
3. Guna mengetahui apakah belanja modal berpengaruh pada PDRB wilayah sumatera 2018-2022.
4. Guna mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap PDRB di wilayah sumatera 2018-2022
5. Guna mengetahui apakah belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh pada PDRB di wilayah sumatera 2018-2022

3. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat dari riset ini yakni guna mengetahui pengaruh belanja: pegawai, barang jasa, modal dan jumlah penduduk pada PDRB daerah tersebut.
2. Penelitian ini diupayakan dapat memberi tambahan informasi terkait pengaruh belanja pemerintah dan jumlah penduduk terhadap PDRB di berbagai wilayah Indonesia.
3. Memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh beberapa variabel penyebab pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Fungsi dan Peran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto (2008) pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian pada sistem kapitalis maupun sosialis. Pada sistem kapitalis pemerintah memiliki peranan yang sangat terbatas, sedangkan pada sistem sosialis, pemerintah memiliki peranan besar. Pemerintah terdiri dari semua organisasi bertugas membuat dan melaksanakan keputusan untuk kepentingan masyarakat. Menurut teori Adam Smith bahwa perekonomian pemerintah selalu memainkan peran, pemerintah mempunyai fungsi:

- 1) Pemeliharaan pertahanan keamanan negara.
- 2) Penyelenggaraan peradilan.
- 3) Penyediaan barang publik (yang tidak mampu di produksi pihak swasta).

Ideologi yang dikemukakan Adam Smith mengalami ketidakselarasan dikarenakan tidak adanya koordinasi, sehingga terjadi ketidakharmonisan pada tiap individu yang berdampak pada peningkatan kesenjangan masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan sektor swasta. Dalam ekonomi modern, terdapat peranan pemerintah sebagai berikut:

1. Peran alokasi adalah pemerintah berperan dalam memastikan bahwa sumber daya ekonomi dialokasikan optimal.
2. Peran distribusi ialah pemerintah berperan dalam memastikan

3. distribusi pendapatan lebih merata guna kesejahteraan masyarakat meningkat.
4. Peran stabilisasi ialah perannya pemerintah guna menambah peluang kerja lalu menjaga stabilitas harga barang untuk mendukung ekonomi sehat.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekoomi

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi. Todaro & Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah tahap dalam pengembangan kapasitas produktif secara berkelanjutan sehingga kemampuan yang dimiliki memberikan hasil output dan pendapatan akan semakin meningkat (Setiawan, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan peran penting pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan mengalokasikan anggaran. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik kepada masyarakat, alokasi anggaran pemerintah perlu dilakukan secara efisien. Kebijakan efisiensi alokasi anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. (Liow *et al*, 2022). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perekonomian amat penting pada pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan tambahan penerimaannya bagi masyarakat waktu tertentu. Aktivitas ekonomi ialah proses menggunakan faktor produksi guna menghasilkan barang jasa kemudian memberikan imbalanya kepada pemilik faktor produksi. Dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat (Erdkhadifa, 2022).

Pendapatan nasional riil yang meningkat dapat diketahui dengan membandingkan angka pendapatan nasional riil dalam tahun tertentu dengan tahun sebelum itu. Perekonomian dapat dikatakan bertumbuh atas peningkatan pendapatan riil masyarakat di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diukur pada data PDRB yang menunjukkan pendapatan dari produksinya barang-jasa periode tertentu.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Keynesian

Buku dengan judul "*The General Theory Of Employment, Interest, And Money*" atau "*The General Theory*" karya John Maynard Keynes tahun 1936 lalu di dalam karya nya berisi teori tentang pertumbuhan ekonomi.

Keynes menyatakan untuk meningkatkan permintaan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran, sehingga akan lebih banyak barang yang diproduksi dan perekonomian akan baik. Permintaan akan menstimulus penawaran tidak sebaliknya sebab pilihan guna menaikkan PDB pada masa sulit sangat terbatas. Pembisnis kemungkinan akan ragu berinvestasi (I), lalu konsumen kemungkinan tak berkeinginan untuk melakukan lebih banyak konsumsi (C).

Teori dasar keynes menyatakan peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi bisa melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, ekspor-impor sangat berperan ke perekonomiannya suatu negara. Faktor ini yakni:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keynes menyatakan faktor dalam rumus tersebut akan saling mempengaruhi pendapatan nasional. Anggaran maksimal dari sektor-sektor terkait dapat meningkatkan pertumbuhannya. Terkait korelasinya belanja publik dan pertumbuhan ekonomi, Keynes

menjelaskan tingginya pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregatsera mendorong aktivitas perekonomian.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.3.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB ialah ukuran yang digunakan melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. PDRB dapat diartikan sebagai total nilai tambah dihasilkan oleh unit usaha suatu wilayah. PDRB terdapat dua jenis yaitu atas harga berlaku (ADHB) dan atas harga konstan (ADHK). PDRB ADHB mencerminkan nilai tambah barang-jasa dihitung berdasar harga tiap tahun, sementara PDRB ADHK ialah nilai tambah yang dihitung berdasarkan harga tertentu. PDRB ADHB digunakan guna melihat pergeseran sera struktur ekonominya, sementara ADHK guna menilai pertumbuhan ekonomi tahunan (BPS, 2007).

Hasil perhitungan PDRB memberikan landasan pengukuran aktivitas ekonomi. Angka PDRB berfungsi sebagai indikator makro dan dasar untuk mengevaluasi kinerja perekonomian serta menyusun kebijakan. Dengan ini, menggambarkan aliran nilai tambah dari barang-jasa yang dihasilkan serta sejumlah faktor produksi guna menciptakan nilai tambah tersebut.

2.1.3.2 Fungsi PDRB

- 1) PDRB tinggi memperlihatkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah.
- 2) PDRB mencerminkan pendapatan bisa dirasakan semua penduduk region.
- 3) PDRB guna menampilkan laju pertumbuhan ekonomi tiap tahun.
- 4) PDRB sektor menggambarkan struktur perekonomian dan perannya di suatu wilayah, termasuk sektor yang berperan besar.

- 5) PDRB berdasar penggunaannya menampilkan cara barang-jasa digunakan konsumsi, investasi, dan perdagangan ke pihak luar.
- 6) PDRB tinggi memperlihatkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah.
- 7) PDRB mencerminkan pendapatan bisa dirasakan semua penduduk region.
- 8) PDRB guna menampilkan laju pertumbuhan ekonomi tiap tahun.
- 9) PDRB sektor menggambarkan struktur perekonomian dan perannya di suatu wilayah, termasuk sektor yang berperan besar.
- 10) PDRB berdasar penggunaannya menampilkan cara barang-jasa digunakan konsumsi, investasi, dan perdagangan ke pihak luar.
- 11) Distribusi PDRB berdasarkan peran lembaga menghasilkan barang /jasa di sektor ekonomi.
- 12) PDRB ADHK berguna mengukur konsumsi, investasi, serta perdagangan luar negeri dan antar provinsi.
- 13) PDRB dan PDRB perkapita ADHK guna mencari tahu pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

2.1.3.3 Metode perhitungan PDRB

BPS (2022) mengemukakan PDRB ialah total nilai tambah oleh semua usaha di suatu wilayah, untuk menghitung PDRB ada 4 pendekatan, yakni:

a. Produksi

PDRB ialah total nilai barang-jasa akhir diproduksi beragam unit produksi suatu wilayah selama 1 tahun. Unit tersebut dikelompokkan, yakni:

- a) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan,
- b) Pertambangan dan penggalan,
- c) Industri pengolahan,
- d) Listrik, gas, dan Air bersih,

- e) Konstruksi,
 - f) Perdagangan, hotel, dan restoran,
 - g) Informasi dan komunikasi,
 - h) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan,
 - i) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.
- b. Pendapatan
- PDRB menurut pendapatan ialah total imbalan yang diterima faktor produksi di suatu daerah selama 1 tahun. Imbalannya seperti upah, gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, sebelum dipotong pajak. PDRB juga mencakup penyusutan dan pajak tak langsung neto. Total semua komponen pendapatan per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Jadi, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto dari semua sektor usaha.
- c. Pengeluaran
- Guna memperhitungkan nilai barang-jasa dikonsumsi semua kelompok masyarakat, seperti rumah tangga, pemerintah, dan lembaga sosial. Pendekatan ini juga mencakup pembuntukan modal serta ekspor. Dikarenakan nilai barang-jasa hanya dari produksi domestik, total pengeluaran komponen perlu dipangkas dengan nilai impor. Penjumlahan semua komponen ini dikenal sebagai PDRB berdasarkan harga pasar.
- d. Metode Alokasi
- Penggunaan metode ini sebab data tersedia tak memungkinkan guna menghitung pendapatan regional melalui cara langsung.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

2.1.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peran pengeluaran pemerintah di negara berkembang amat penting sebab pihak swasta memiliki kemampuan terbatas untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan negara mengganti sistem perekonomian dengan kebijakan fiskal, yakni dengan pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara (Sari *et al.*, 2016).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sepenuhnya didanai oleh pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, dengan adanya aktivitas pemerintah yang luas, maka pengeluaran pemerintah yang digunakan akan semakin besar. Pengeluaran pemerintah yang meningkat akan memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Wahyudi, 2020).

2.1.5 Belanja Pegawai

2.1.5.1 Pengertian Belanja Pegawai

Pendapat Kementerian Keuangan, belanja pegawai ialah kompensasi dimana bentuk uang atau barang didistribusikan pada PNS, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer (diangkat sebagai pegawai pemerintah). Ini diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka guna memperkuat tugas-fungsi organisasi pemerintah, kecuali untuk pekerjaan yang terkait pada pembentukan modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja pegawai digunakan guna anggaran kompensasi bagi Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, serta Pegawai ASN yang ditetapkan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja pegawai ialah pengeluaran untuk kompensasi berbentuk gaji, tunjangan & penghasilan lainnya. Kelompok belanja pegawai mencakup gaji, tunjangan, lembur, honorarium & cuti. Gaji dan tunjangan ialah pembayaran yang wajib diberikan kepada pegawai pemerintah, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan terkait jenis pekerjaannya.

2.1.6 Belanja Barang Jasa

2.1.6.1 Pengertian Barang Jasa

Menurut Kementerian Keuangan, belanja barang jasa ialah pengeluaran guna membeli barang dan jasa habis pakai, baik guna menghasilkan barang-jasa dijual maupun yang tidak. Ini juga mencakup pengadaan barang guna diserahkan kepada masyarakat, serta belanja perjalanan. Belanja ini meliputi:

a. Belanja barang operasional dan non operasional

Belanja operasional mencakup kebutuhan perkantoran, pengadaan bahan makanan, pengiriman surat dinas, honor operasional satuan kerja, dan barang lainnya untuk kebutuhan dasar. Lalu belanja non-operasional mencakup belanja bahan, honor aktivitas, kerugian selisih kurs, dana bantuan operasional perguruan tinggi, denda keterlambatan pembayaran, dan barang lain terkait target kinerja.

b. Belanja jasa

Belanja jasa mencakup pengeluaran untuk langganan energi juga jasa, jasa pos dan giro, jasa konsultan, sewa, profesi, serta belanja lainnya.

c. Belanja pemeliharaan

Belanja ini tak memberi manfaat ekonomi di masa depan untuk hal kapasitas, kualitas produksi, atau peningkatan standar performa.

d. Belanja perjalanan

Belanja ini tidak diperuntukkan guna tujuan perolehan aset tetap

e. Belanja barang

Belanja diberikan kepada masyarakat atau pemerintah daerah adalah pengeluaran anggaran negara yang berkaitan ke tugas, fungsi, strategi target kinerja, dan tujuan kegiatan, tetapi bukan termasuk kategori belanja bantuan sosial, antarlain:

- 1) Belanja pengadaan tanah, peralatan/mesin, gedung, jalan, irigasi/jaringan guna diserahkan kepadamasyarakat/pemda.
- 2) Belanja barang fisik guna diserahkan kepada

masayarakat/pemda.

- 3) Belanja barang guna diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang.
- 4) Belanja barang penunjang, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan guna diserahkan kepada pemda
- 5) Belanja barang berupa tanah, peralatan/mesin serta gedung dan bangunan guna diserahkan kepada mantan presiden/wakil mantan presiden.

f. Belanja barang dan jasa BLU

Ini termasuk pembayaran gaji/tunjangan pegawai BLU.

2.1.7 Belanja Modal

2.1.7.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan, belanja modal ialah anggaran aset tetap dan aset lain yang memberi manfaat lebih dari satu tahun masa akuntansi. Berdasarkan Permendagri, setiap provinsi harus mengalokasikan setidaknya 30 persen untuk belanja modal dan nilai aset tetap. Belanja modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang untuk pembiayaan pemeliharaan aset tetap dalam mengatur kas daerah yang digunakan dalam pelayanan publik di daerah (L, 2016) .

Aset belanja modal digunakan oleh pemda guna memberikan layanan kepada masyarakat, seperti tanah, peralatan, gedung, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pembangunan aset tetap mencakup harga beli atau biaya pembangunan aset tersebut. Aset tetap diperoleh dari belanja modal sangat penting bagi pemda guna memberikan pelayanannya ke publik.

2.1.7.2 Klasifikasi Belanja Modal

Pemerintah daerah mendistribusikan dananya belanja modal guna menambah aset tetap. Anggaran ini disusun berdasarkan kebutuhan

daerah terkait sarana-prasarana, guna mendukung tugasnyapemerintah ataukah fasilitas publik. Tiap tahunnya, pemerintah daerah melakukan pengadaan aset tetap sesuai prioritas anggaran dan pelayanan publik yang berdampak jangka panjang di segi finansial. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.02/2011, ada beberapa klasifikasi belanja modal, diantaranya untuk belanja:

1. Tanah

Seluruh belanja yang bersifat administratif sehubungan denganperolehan hak-kewajiban atas tanah.

2. Peralatan dan Mesin Pengeluaran

Pengeluaran guna membeli peralatan-mesin akan dipakai dalam berbagai aktivitasnya hingga alat siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Pengeluaran guna memperoleh gedung-bangunan melalui kontrak hingga bangunan siap dipakai.

4. Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Guna memperoleh jalan dan jembatan, irigasi danjaringan hingga siap pakai, belanja ini mencakup biaya penambahan dan penggantian masa manfaat.

5. Belanja Lain

Kegiatan pengadasaan lain di samping kriteria belanja sebelumnya.

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Guna perolehan aset untuk dipakai dalam upaya penyelenggaraan operasional badan layanan umum.

2.1.7.3 Peran Belanja Modal

Permendagri No.13 Tahun 2006, Pasal 53, menyatakan Belanja Modal digunakan membeli atau membangun aset tetap berwujud yang memiliki manfaat >12 bulan guna kegiatan pemerintahan. Contohnya termasuk

tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, irigasi, dan jaringan. Nilai beli atau bangunan aset tetap dalam belanja modal hanya mencakup harga beli atau nilai bangunsn tersebut.

Kriteria utama bagi pemda dalam memberikan pelayanan publikny ialah aset tetap diperoleh dari belanja modal. Guna menaikkan aset ini, pemda mengalokasikan anggaran belanja modalnya dalam APBD berdasarkan kebutuhan sarana dan prasarana. Tiap tahunnya, pemda membeli aset tetap sesuai prioritasnya yang berdampak jangka panjang secara finansial.

2.1.8 Jumlah Penduduk

BPS, mengemukakan jumlah penduduk mencakup semua orang yang tinggal pada suatu daerah sepanjang sebulan atau lebih, serta yang tinggal > 6 bulan tetapi berniat untuk menetap. Menurut (Yunianto, 2021), jumlah penduduk yang besar dapat menciptakan potensi pertumbuhan pasar, sehingga jumlah penduduk menjadi faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk suatu wilayah bisa menjadi modal berharga jika didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan teknologi yang baik. Ada 3 faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu tingkat kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan penduduk (Silastri *et al*, 2017)

Jumlah penduduk suatu wilayah bisa menjadi modal berharga jika didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan teknologi yang baik. Ada 3 faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu tingkat kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan penduduk (Silastri *et al*, 2017).

2.1.8.1 Teori Jumlah Penduduk

a) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi: jumlah penduduk, persediaan barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta penerapan teknologi. Mereka berpendapat bahwa penambahan jumlah penduduk dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, asumsinya luas tanah dan teknologi tetap. Ini merupakan paparan dari teori tersebut, yakni:

- 1) Pertumbuhan ekonominya cenderung tinggi ketika jumlah penduduknya rendah, persediaan barang modalnya melimpah lalu lahan tanah tersedia dalam jumlah besar
- 2) Pertumbuhan ekonomi dianggap stagnan ketika produktivitas menurun akibat kapasitas produksi yang terbatas, sehingga kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi juga mengalami penurunan.

2.8.2 Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang mendiami daerah tertentu didorong tiga faktor: tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Ada beberapa faktor mempengaruhi jumlah penduduk :

1) Kelahiran

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ialah tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran yang tinggi dapat memfaktori pertumbuhan populasi, kelahiran diukur menggunakan indikator angka kelahiran (*birth rate*) yang menggambarkan jumlah bayi yang lahir dalam periode tertentu atau biasanya dihitung per 1.000 penduduk selama satu tahun.

2) Tingkat Kematian

Tingkat kematian ialah angka guna menilai seberapa tinggi atau rendah angka kematian penduduk di suatu wilayah.

3) Migrasi

Migrasi adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang dapat bersifat sementara atau permanen. Perpindahan ini dapat menyebabkan penambahan atau pengurangan jumlah penduduk di suatu wilayah, dilihat dari lebih banyak penduduk yang masuk atau penduduk yang keluar.

2.2 Pengaruh Antara Variabel

2.2.1 Pengaruh antara Belanja Pegawai terhadap PDRB

Belanja pegawai memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian di suatu wilayah. Belanja pegawai dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui penghasilan yang diterima dan akan menciptakan aliran dana yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, peningkatan belanja pegawai akan meningkatkan permintaan barang jasa berdampak baik pada pertumbuhan sektor ekonomi regional (Pusporini, 2020). Dengan pendapatan yang lebih tinggi, mereka akan membelanjakan uang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan layanan, yang meningkatkan permintaan barang dan jasa di masyarakat. Peningkatan konsumsi ini mendorong aktivitas ekonomi, sehingga membantu pertumbuhan PDRB. Hal ini menciptakan aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Menurut (Ayu, 2020) hubungan antara belanja pegawai positif-signifikan terhadap PDRB.

2.2.2 Pengaruh antara Belanja Barang Jasa terhadap PDRB

Belanja barang jasa mencerminkan pengeluaran pemerintah, perusahaan dan individu guna memperoleh barang dan layanan yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional, pengeluaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai PDRB. Menurut (Tri, 2023) hubungan belanja barang jasa positif signifikan

paada PDRB. Belanja barang dan jasa dapat menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian suatu wilayah, permintaan yang tinggi akan mendorong aktivitas produksi dan perdagangan dalam perekonomian yang akan menggerakkan pertumbuhan sektor-sektor terkait (Rahmawati, 2019).

Belanja barang jasa sangat berperan pada PDRB suatu wilayah dikarenakan dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian. Belanja ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika belanja barang jasa dilakukan secara efektif, permintaan akan produk dan layanan lokal akan meningkat yang gilirannya mendorong industri untuk memproduksi lebih banyak dan nantinya akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja (Mawaddah *et al.*, 2019).

2.2.3 Pengaruh antara Belanja Modal terhadap PDRB

Belanja modal memiliki peranan aktif untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi aset tetap contohnya infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi, serta peralatan produksi dan teknologi, memiliki efek yang berkelanjutan terhadap produktivitas dan daya saing ekonomi. Ketika pemerintah meningkatkan belanja modal akan menjadikan hal positif yang berdampak pada PDRB di wilayah tersebut. Belanja modal dapat menciptakan efek dorongan langsung pada pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan kapasitas produksi serta efisiensi (Maulida, 2017).

Dalam investasi infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan dan lainnya memberikan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa untuk perusahaan guna menjangkau pasar lebih luas serta menambah produktivitas dengan mengurangi biaya logistik (Widodo, 2020).

Sektor yang meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi melalui investasi dalam peralatan dan teknologi akan meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian secara keseluruhan.

2.2.4 Pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap PDRB

Salah satu determinannya pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, dikarenakan jumlah penduduk digunakan sebagai faktor produksi guna melakukan kegiatan produksi pada suatu sektor. Jumlah penduduk yang lebih besar biasanya meningkatkan permintaan barang dan jasa di wilayah tersebut yang berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain itu, banyaknya penduduk juga berarti lebih banyak tenaga kerja yang tersedia, yang dapat meningkatkan produksi. Pertumbuhan penduduk yang konsisten dapat meningkatkan produktivitas dan output ekonomi, serta mengurangi kemiskinan melalui penciptaan peluang ekonomi dan peningkatan akses terhadap sumber penghasilan yang stabil (Arhaninka et al., 2024).

2.3 Tinjauan Empiris

Disajikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti dalam membahas terkait topik penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mustina Ayu (2020)	Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Data Panel	Belanja Pegawai dan Belanja Barang berpengaruh positif ke PDRB, sementara belanja modal berpengaruh negatif-signifikan pada PDRB Provinsi Sumsel 2016-2018.
2.	Pusporini (2020)	Analisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah	Data Panel	Belanjapegawai dan belanja barang/jasa berpengaruh positif-signifikan pada pertumbuhan ekonomi, belanja modal tidak berpengaruh signifikan ke pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota di Jawa Tengah 2017-2018.

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
3.	Geraldo Marcellino, Andersin G, Krest D (2023)	Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Selama Pandemi Covid-19	Data Panel	Belanja Modal dan belanja operasional berpengaruh positif- tak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kab/kota Provinsi Sulawesi Utara saat Covid.
4.	Parno, Daru Tri Rekso Joko Nuryanto (2023)	Hubungan Belanja Pemerintah Terhadap PDRB di Kalimantan	Stochastic Frontier Analysis	Belanja pegawai, barang, belanja modal berpengaruh positif -signifikan pada PDRB Pulau Kalimantan 2015-2021.
5.	Darwin Damanikdan Irsyad Lubis(2022)	Analisis Pengaruh Demokrasi, Jumlah Penduduk,dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera	Data Panel	Demokrasi, jumlah penduduk berpengaruh positif-tak signifikan pada pertumbuhannya, sementara IPM berpengaruh negatif - signifikan pada pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera 2016-2021.
6.	Dewi Arhanika, Masruri Muchtar, Padomuan Robinson, Muhammad Heru (2024)	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat :Pengaruh Sinergis Jumlah Penduduk dan Belanja Negara	Data Panel	Jumlah penduduk dan belanja operasional berpengaruh positif ke pertumbuhan sementara belanja modal juga transfer tak berpengaruh-signifikan pada pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumbar 2017-2021.

Pada penelitian ini penulis mengadopsi dari penelitian (Ayu, 2020) dengan mengambil variabel Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa dengan hasil penelitian berpengaruh positif-signifikan pada PDRB. Serta penelitian (Pusporini, 2020) penulis mengambil variabel Belanja Modal dengan hasil riset berpengaruh positif-tak signifikan pada PDRB dan penelitian (Darwin, 2024). Penulis mengambil variabel Jumlah Penduduk dengan hasil penelitian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan riset ini dengan yang lalu ialah adanya gabungan sejumlah ide riset terdahulunya lalu dikumpulkan juga perbaharui di segi lokasi penelitian, waktu, juga variabel–variabel independennya.

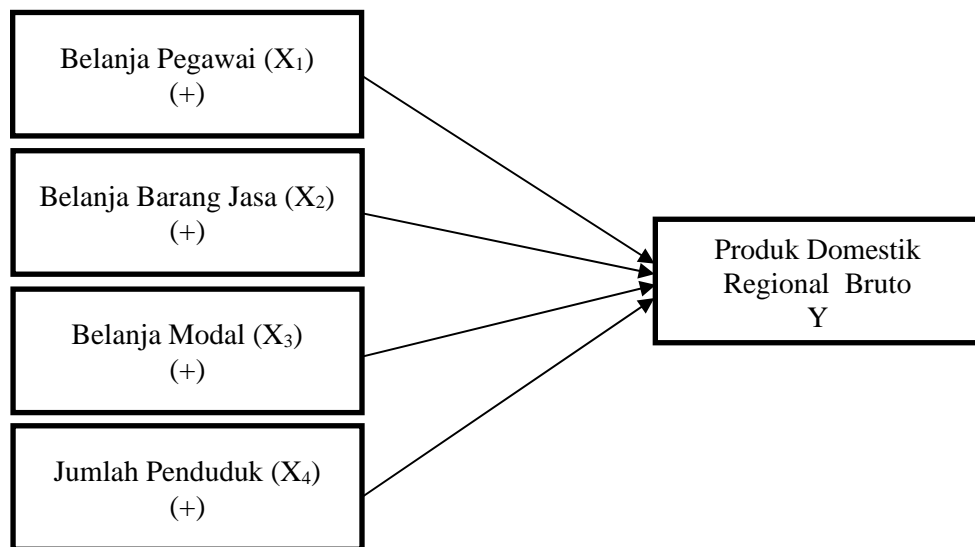
2.4 Kerangka Pemikiran

Kementerian Keuangan (2022), menyatakan bahwa peran pemerintah daerah saat ini sangat berperan aktif dalam menciptakan masalah perekonomian, salah satu nya melalui belanja daerah. Alokasi yang dikucurkan pemerintah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah adalah dan APBN yang telah ditransfer melalui APBD dengan prioritas untuk pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

Pembangunan ekonomi yang efisien menjadi prioritas setiap daerah. Masalah yang dihadapi di wilayah tersebut mencakup banyak daerah yang masih kesulitan dalam pembangunan. Tantangan utama bagi daerah otonom baru ialah meningkatkan pendapatannya daerah serta kemandirian dalam pembangunan, yang terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Dalam konteks wilayah, pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan total pendapatan masyarakat di daerah itu, yaitu naiknya nilai tambah keseluruhannya (Tarigan, 2014).

Pertumbuhan ekonomi terlihat melalui kenaikannya nilai PDRB, dipengaruhi oleh konsumsi belanja daerah untuk membayar pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya penerimaan daerah bisa menaikkan pembangunan ekonomi daerah dimana berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Widiastuti, 2022). Jumlah penduduk yang cukup besar juga sangat berperan dalam peningkatan perekonomian suatu daerah, peningkatan jumlah penduduk memberikan implikasi dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumberdaya pada suatu wilayah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di masa depan (Kezia Tamba & Alexandra Hukum, 2024).

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa penerimaan belanja dan jumlah penduduk pada suatu daerah merupakan salah satu solusi untuk membantu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan melihat pada sumber- sumber penerimaan dari APBD. Dengan demikian, dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu, diduga :

1. Diduga Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di wilayah sumatera 2018-2022.
2. Diduga Belanja barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di wilayah sumatera 2018-2022
3. Diduga Belanja Modal berpengaruh positif terhadap PDRB di wilayah sumatera 2018- 2022.
4. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PDRB di wilayah sumatera 2018-2022.
5. Diduga Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB di wilayah sumatera 2018-2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini pendekatannya kuantitatif. Metode kuantitatif ialah metode penelitian dimana fokus ke pengukuran objektif fenomena sosial. Riset ini menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Keuangan (DJKP). Penulis memilih wilayah penelitian yakni 10 provinsi (2018-2022).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data gabungan diaplikasikan untuk riset ini, yakni data *cross section* dan *time series* atau dikenal data panel. Data *cross section* yang digunakan adalah data 10 provinsi dengan periode (2018-2022). Berikut ini adalah tabel yang berisi variabel, simbol, satuan dan sumber data yang digunakan.

Tabel 3.1 Deskripsi Data

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	Miliar	BPS
Belanja Pegawai	BP	Miliar	DJP Kemenkeu
Belanja Barang Jasa	BB	Miliar	DJP Kemenkeu
Belanja Modal	BM	Miliar	DJP Kemenkeu
Jumlah Penduduk	JP	Ribu Jiwa	BPS

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ialah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang dipilih peneliti untuk dipelajari guna mengumpulkan data dan mengembangkan kesimpulan. Variabel penelitian pada hakikatnya ialah karakteristik seseorang atau suatu barang yang berbeda-beda pada setiap orang. Berikut merupakan beberapa variabel dalam penelitian, diantaranya :

1) Variabel terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat penelitian ini yaitu PDRB di wilayah Sumatera. Dimana datanya merupakan data yang mengkombinasikan data lintas waktu dan data runtutan tahun 2018-2022 bersumber dari BPS.

2) Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

a. Belanja Pegawai (X_1)

Menurut Kementerian Keuangan, Belanja pegawai ialah imbalan berupa uang atau barang yang diberikan ke PNS, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer sesuai peraturan, sebagai bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Data yang digunakan berasal dari DJPK.

b. Belanja Barang Jasa (X_2)

Menurut Kementrian Keuangan, Belanja barang jasa ialah pengeluaran guna membeli barang jasa habis pakai dalam proses produksi barang jasa yang dijual dan ditunjukkan kepada masyarakat. Data yang diperoleh dari DPJK.

c. Belanja Modal (X_3)

Menurut Kementerian Keuangan, belanja modal merupakan pengeluaran dengan manfaat berlangsungnya lebih dari satu tahun anggaran dan diharapkan dapat meningkatkan anggaran rutin untuk biaya pemeliharanya. Data yang digunakan diperoleh dari DJPK.

d. Jumlah Penduduk (X_4)

Menurut BPS, jumlah penduduk ialah kelompok tinggalnya di suatu daerah untuk sebulan atau lebih ataupun yang telah tinggal

lebih dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap. Data diperoleh dari BPS.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis riset ini adalah analisis kuantitatif deskriptif berupa regresi data panel. Data panel ialah data yang dikumpulkan dari pengamatan beberapa individu yang diamati pada sejumlah periode waktu yang berurutan dengan penggunaan 5 tahun 2018-2022. Bentuk persamaan tersebut digunakan untuk variabel terikat dan variabel bebasnya. Model penelitian sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 BP_{it} + \beta_2 BB_{it} + \beta_3 BM_{it} + \beta_4 JP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

BP	= Belanja Pegawai
BB	= Belanja Barang Jasa
BM	= Belanja Modal
JP	= Jumlah Penduduk
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien
i	= 1,2,..,n, menunjukkan data <i>cross section</i>
t	= 1,2,...,n menunjukkan data <i>time series</i>
ε	= Variabel Gangguan (<i>Error Term</i>)

3.5 Prosedur Analisis Data

3.5.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Secara umum terdapat tiga metode estimasi regresi dalam data panel antara lain *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemahaman tentang hubungan antara variabel dependen dan independen menggunakan data panel adalah analisis regresi data panel. Regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga metode estimasi yang berbeda, antara lain:

a. Common Effect Model (CEM)

CEM ialah perkiraan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* serta merupakan estimasi dasar dalam pengujian data panel (Widarjono, 2018).

b. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini asumsinya di perbedaan intersep model data panel (Widarjono, 2018). Penggunaan variabel dummynya guna menangkap perbedaan intersep antar variabel.

c. Random Effect Model (REM)

REM merupakan variasi dari estimasi *Generalized Least Square*. Metode ini asumsinya efek individu tak terobservasi tidak memiliki korelasi dengan regressor atau dapat dikatakan sifatnya acak.

3.5.2 Uji Spesifikasi Model

Pemilihan model yang optimal guna menentukan teknik estimasi sangat diperlukan. Metode regresi data panel yang mencakup 3 estimasi berbeda yakni, CEM, FEM, REM. Terdapat beberapa pengujian guna memilih metode estimasi panel, menurut (Widarjono, 2018) adalah sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow dilaukan untuk menentukan model terbaik, yaitu antara model FEM dan CEM. Hasil pengujian ini dapat melihat nilai probabilitasnya. Adapun hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

Jika *P-value* < taraf nyata (α), maka H_0 ditolak

Jika *P-value* > taraf nyata (α), maka H_a diterima

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan guna memilih antara model FEM atau REM

Hipotesis pengujian sebagai berikut:

H_0 = Metode *Random Effect*

H_a = Metode *Fixed Effect*

Dengan kriteria Pengambilan keputusan sebagai berikut :

Jika *P-value* < taraf nyata (α), maka H_0 ditolak

Jika *P-value* > taraf nyata (α), maka H_a diterima

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) ialah uji guna memilih model REM atau model CEM yang paling tepat digunakan.

Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 = *Common Effect Model*

H_a = *Random Effect Model*

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

Jika *P-value* < taraf nyata (α), maka H_0 ditolak

Jika *P-value* > taraf nyata (α), maka H_a diterima

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini ialah syarat analisis guna menentukan hasil regresi yang terbaik untuk dianalisis. Terdapat empat pengujian, yakni:

a. Uji Normalitas

Uji ini diperlukan guna menacaritahu residual hasil regresi yang dipakai telah terdistribusi normal ataukah belum. Metode

berdasarkan nilai *Jarque-Bera Test* (JB-Test). Hipotesis pengujian sebagai berikut:

H_0 : Residual terdistribusi normal, jika probabilitas J-B $> (\alpha) 5\%$

H_a : Residual terdistribusi normal, jika probabilitas J-B $< (\alpha) 5\%$.

b. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas ialah korelasi linier antara variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi semourna antar variabel independennya. Pengujian dikatakan terjadi multikolinieritas apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10

H_0 = Tidak terjadi multikolinieritas (*Variance Inflation Factor* < 10)

H_a = Terjadi multikolinieritas (*Variance Inflation Factor* > 10)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian terkait ada atau tidaknya perbedaan dengan varian antar residual satu observasi dengan observasi lainnya (Widarjono, 2018). Uji glesjer ialah pengujian untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai masalah heteroskedastisitas atau tidak.

Hipotesis pengujian sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas, nilai probabilitas F-statistik > 0.05

H_a : Terdapat heteroskedastisitas, nilai probabilitas F-statistik < 0.05

3.5.4 Pengujian Hipotesis

a. Uji t Statistik

Uji t statisistik dilakukan guna meninjau pengaruh variabel independenn secara individual terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018). Uji ini perlu memperhatikan nilai t-hitung dan nilai t-tabel, tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$)

a.) Belanja Pegawai

$H_0: \beta_1 \leq 0$: Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap PDRB di wilayah Sumatera.

$H_a: \beta_1 > 0$: Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap PDRB di wilayah Sumatera.

b.) Belanja Barang Jasa

$H_0: \beta_2 \leq 0$: Belanja Barang Jasa tidak berpengaruh terhadap PDRB di wilayah Sumatera.

$H_a: \beta_2 > 0$: Belanja Barang Jasa berpengaruh positif terhadap PDRB di wilayah Sumatera

c.) Belanja Modal

$H_0: \beta_3 \leq 0$: Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap PDRB di wilayah Sumatera.

$H_a: \beta_3 > 0$: Belanja Modal berpengaruh positif PDRB di wilayah Sumatera.

d.) Jumlah Penduduk

$H_0: \beta_4 \leq 0$: Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PDRB di wilayah Sumatera.

$H_a: \beta_4 > 0$: Jumlah Penduduk berpengaruh positif PDRB di wilayah Sumatera.

b. Uji F Statistik

Uji F dilakukan untuk meninjau korelasi antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Widarjono, 2016).

Hipotesis dari penelitian ini:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

Disimpulkan bahwa bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh signifikan pada PDRB.

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

Disimpulkan bahwa bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan pada PDRB.

H_0 = Tidak berpengaruh jika F hitung < F tabel atau probabilitas > 0.05

H_a = Berpengaruh jika F hitung > F tabel atau probabilitas < 0.05

Dimana tingkat signifikasinya = 0.05, kriterianya saat F-hitung > daripada F-tabel, olehnya secara simultan variabel independennya mempengaruhi variabel dependennya secara signifikan. Kebalikannya, F- hitung < daripada F-tabel, olehnya secara simultan tiada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya.

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini guna mengetahui seberapa besar kapabilitas variabel independent menjelaskan variabel dependen (Widarjono, 2018).

Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$, olehnya disimpulkan:

1. Jika nilai R^2 mendekati 0, maka kemampuan variabel independen menjabarkan variabel dependennya sangat kecil.
2. Jika nilai R^2 mendekati 1, maka kemampuan variabel independen dalam menjabarkan variabel dependennya sangat besar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis yang sudah dijalankan menggunakan E-views. Demikian, terdapat sejumlah kesimpulan yakni:

1. Hasil regresi menggunakan model REM dengan hasil membuktikan belanja pegawai berpengaruh positif-signifikan pada PDRB di wilayah Sumatera tahun 2018-2022. Dengan demikian, semakin meningkatnya belanja pegawai pemerintah akan meningkatkan PDRB wilayah Sumatera, *ceteris paribus*.
2. Hasil regresi menggunakan model REM dengan hasil membuktikan bahwa belanja barang jasa berpengaruh positif-signifikan pada PDRB di wilayah Sumatera tahun 2018-2022. Dengan demikian, semakin meningkatnya belanja barang jasa pemerintah akan meningkatkan PDRB di wilayah Sumatera, *ceteris paribus*.
3. Hasil regresi menggunakan model REM dengan temuannya dimana belanja modal berpengaruh positif tak signifikan pada PDRB di wilayah Sumatera tahun 2018-2022. Dengan demikian, semakin meningkatnya belanja modal pemerintah akan meningkatkan PDRB wilayah Sumatera namun tidak signifikan, *ceteris paribus*.
4. Hasil regresi menggunakan model REM dengan temuannya dimana jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tak signifikan pada PDRB di wilayah Sumatera tahun 2018-2022. Dengan demikian, semakin meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan PDRB wilayah Sumatera namun tidak signifikan, *ceteris paribus*.

5.2 Saran

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan telah dilakukan, maka terdapat saran yang diharapkan bermanfaat sebagai pemikiran penelitian berikutnya yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah di Wilayah Sumatera harapannya dapat mengalokasikan belanja daerahnya lebih proposional antara belanja yang sifatnya konsumtif dengan belanja yang bersifat produktif. Untuk mencapai tujuan ini peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik menjadi hal yang penting. Dengan menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka, pemerintah dapat memastikan belanja daerah tidak hanya efisien tetapi dapat memberikan nilai tambah yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi regionalnya. Melalui adanya hal ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintah dalam meningkatkan nilai PDRB di suatu daerah.
2. Pemerintah daerah di Wilayah Sumatera harus mengevaluasi belanja modalnya. Pentingnya peran infrastruktur terhadap PDRB sehingga alokasi pengeluaran pemerintah di belanja modal sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan mengalokasikan dana pengeluaran pemerintah yang maksimal, seperti pembangunan jalan pada daerah-daerah. Dikarenakan belanja modal merupakan bagian dari konsumsi yang secara signifikan berkontribusi terhadap PDRB dari sisi pengeluaran pemerintah, serta memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan pertimbangan mengenai variabel berbeda dalam meningkatkan PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro, R. (2022). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dbh, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Daerah Tertinggal. *Jurnal Budget*, 7(2), 256–276.
- Ardianto, E. A., & Usman, M. (2022). Analisis Eksternalitas Positif Program "Wisata Alam 21" Desa Aji Mesir Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang. *E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.23960/efebe.v1i1.10>
- Arhaninka, D., Muchtar, M., Sihombing, P. R., & Akhmadi, M. H. (2024). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat: Pengaruh sinergis jumlah penduduk dan belanja negara. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1006–1018. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.975>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. 6.*
- Ayu, Mustina. (2019). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. <https://repository.unsri.ac.id/30054/>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Data Pertumbuhan PDRB Seri 2010*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Basuki, A., & Prawoto, N (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Case, K. E & Fair, R. C. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi 8*. Diterjemahkan Oleh Y. Andri Zaimur. Jakarta: Erlangga.
- Damanik, D., & Lubis, I. (2022). Analisis Pengaruh Demokrasi, Jumlah Penduduk, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sumatera. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan(SNPK)*, 1, 503–515. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.80>
- Dein, S. N., & Misra, F. (2023). Analisis Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Belanja Berkualitas (Studi Kasus pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(4), 4526–4544. <https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/2664%0Ahttps://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/download/2664/1495>

- Desmawan, D., Fitriyaningsih Fitriyaningsih, Rizka Falah S., Drajat, N. A., Diani, N. W., & Marlina, S. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 150. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/1543>
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Data Series APBD*. [Kemenkeu.go.id.https://djk.kemenkeu.go.id/?p=5412](https://djk.kemenkeu.go.id/?p=5412)
- Erdkhadifa, R. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR DENGAN*. 11(2), 122–140.
- Ghozali & Imam. (2018). *Aplikasi analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gosal, J. S., Lopian, A. L. C. P., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 85–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/42453/37485>
- Gujarati, n, damodar. (2012). *Dasar- Dasar Ekonometrika*. Salemba empat, Jakarta.
- Gujarati n., D., & Porter, c, dawn. (2009). *Basic Econometric 5th Edition*. Mcgraw - Hill : New York.
- Handriyanto Setiadi, & Ratna Christianingrum. (2016). Profil Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Wilayah Kota Palangkaraya Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 1(1), 55–76. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v1i1.22>
- Husin, H. (2022). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah Dan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Cafeteria*, 3(2), 101–110. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v3i2.634>
- Hutahaean, P. (2019). Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Analisis Kointegrasi dan Kausalitas. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i2.411>
- Kermite, G. M., Kumenaung, A. G., Tolosang, K. D., & et al. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Operasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 193–204.
- Kuncoro, M. (1997). *EKONOMI PEMBANGUNAN*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- L, G. A. (2016). *Terhadap Belanja Modal*. 7(2005), 692–702.
- Liow, maria omega, Naukoko, A., & Wensy, R. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2), 140.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: FE UGM.
- Martadinata, M. A. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 37–45.
- PANGESTU, E. C. (2019). Pengaruh Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.20527/jiep.v1i1.1113>
- Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pegawai.
- Peraturan Presiden. Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Puspitasari, L. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Adhk (Atas Dasar Harga Konstan) Di Kabupaten Berau. ... *Information All About Development Journal*, 5(1). <https://jurnal.umberau.ac.id/index.php/ecobuild/article/view/591%0Ahttps://jurnal.umberau.ac.id/index.php/ecobuild/article/download/591/340>
- Pusporini, I. D. (2020). ISSN: 2337-3067 ANALISIS PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DI PROVINSI JAWA TENGAH Irma Dwi Pusporini Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Email : irma2pusporini@yahoo.com PENDAHULUAN Era otonomi daerah dimulai. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 485–508.
- RAHMAWATI, R. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i1.1157>
- Rajab, A., & Muchtar. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat PDRB Provinsi Sulawesi Barat. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 280–289.
- Ratih, G. A. P. A, Utama, M. S., & Yasa, I. N. M (2017). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali.

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 1(6), 29-54.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/24472/16623/>

- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Setiawan, Y. A. (2018). Insitusi dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Negara- Negara Anggota ASEAN tahun 2008-2015. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sukirno, S (2000). *Makroekonomi modern: perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru*. Raja grafindo pustaka.
- Soengkowo, B. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Bati Soengkowo*, 5(3), 248–253.
- Syahputra, R. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 1(2), 183–191.
- Syahrudi, A. F., & Amalia, S. (2024). *Belanja Daerah , Dividen Penyertaan Modal , dan Dampaknya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Timur*. 5(2), 563–580.
- Tarigan, R (2014). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Taher, S., & Tuasela, A. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 3(2), 40–58. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/80>
- Tahu, G. P., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., Menes, C. C., & Orbaningsih, D. (2024). the Influence of Regional Original Income and General Allocation Funds on Economic Growth With Capital Expenditures As an Intervening Variable. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(6), 1–19. <https://doi.org/10.24857/RGSA.V18N6-051>
- Tanjungpura, U. (2022). *Pengaruh Hasil Produk Domestik Regional Bruto Terhadap PertumbuhanEkonomi (Studi Kasus : Kabupaten Bengkayang)*. 502–512.
- Tempone, P., Kalangi, J. B., & Siwu, H. F. D. (2020). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 134–144.
- Todaro, Smith, & Michael, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (ed. 11, ji).Ppenerbit Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Treza Tampubolon, L., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 25–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.151>
- Tri, D., & Joko, R. (2023). Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kalimantan Melalui Pendekatan Stochastic Frontier Analysis. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 35–50. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.476>
- Undang- Undang Nomor . 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 103 113.
- Widarjono, A. (n.d.). *EKONOMETRIKA : teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis, edisi kedua*. Yogyakarta: FE universitas islam indonesia.
- Widarjono, A. (2019). *EKONOMETRIKA : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Edisi Kelima)*. UPP STIM YKPN.
- Widiastuti, N., & Sutrischastini, A. (2022). Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Data Panel Provinsi Di Indonesia. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 1–16. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.394>
- Wibisono, E., Amir, A., & Zulfanetti, Z. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jambi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(3), 200–212. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.3.200-212>
- Widodo, S., & Anggaran, P. K. (2020). *PENGARUH BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BELANJA MODAL , BELANJA BARANG , DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2014-2019*. 5(2), 1–17.
- Yuliawan, D., Lampung, U., Wanniatie, V., & Lampung, U. (2020). Analisis Covid - 19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020.144-158
- Yuniarti, P. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi SERAMBI Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. October*. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>